

ABSTRAKSI

ANALISIS PERKEMBANGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN LUMAJANG

Oleh :

LUHUR PENGAYOMAN

NIM. 211131500

Dalam menjalankan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif, efisien, dan mampu mendorong peran masyarakat dalam meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Keberhasilan Otonomi Daerah tidak terlepas dari kemampuan dalam bidang keuangan.

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat perkembangan kemampuan keuangan di Kabupaten Lumajang dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Lumajang. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data keuangan APBD di Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2010-2015. Adapun teknik pengumpulan data adalah dengan dokumentasi dan yang dilakukan di DPKD Kabupaten Lumajang

Metode Penelitian adalah Deskriptif Komparatif, dengan menggunakan beberapa rasio keuangan, yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, derajat desentralisasi fiskal, indeks kemampuan rutin, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut : Berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah yang ditunjukkan dengan angka rasio rata-ratanya adalah 7,88% masih berada diantara 0% - 25% tergolong mempunyai pola hubungan instruktif yang berarti kemampuan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Sosial masyarakat masih relatif rendah meskipun dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan penurunan Dalam Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal hanya memiliki rata-rata 6,80%. hal ini berarti bahwa tingkat kemandirian/kemampuan keuangan Kabupaten Lumajang masih rendah dalam melaksanakan otonominya. Berdasarkan rasio IKR rata-rata hanya sebesar 9,75 %, ini artinya PAD memiliki kemampuan yang sangat kurang untuk membiayai pengeluaran rutinnya. Pada Rasio Keserasian, pengeluaran belanja rutin lebih besar dibandingkan dengan belanja pembangunan. Sedangkan dalam Rasio Pertumbuhan, secara keseluruhan mengalami peningkatan disetiap tahunnya yang disebabkan bertambahnya pajak dan retribusi daerah.

Dengan melihat hasil analisis diatas, perkembangan keuangan di Kabupaten Lumajang disektor Keuangan masih kurang. Untuk itu diperlukan upaya untuk peningkatan PAD baik secara ekstensifikasi yaitu pemerintah daerah harus dapat mengidentifikasi potensi daerah sehingga peluang-peluang baru untuk sumber penerimaan daerah dapat dicari, sedangkan secara intensifikasi dengan memperbaiki kinerja pengelolaan pemungutan pajak.

Kata Kunci : Pemerintah daerah, otonomi daerah, Keuangan daerah.

ABSTRACT
ANALYSIS OF FINANCIAL DEVELOPMENT IN THE ABILITY TO
SUPPORT IMPLEMENTATION IN DISTRICT
AUTONOMY LUMAJANG

by:
LUHUR PENGAYOMAN
NIM. 211131500

In carrying Autonomous Region, the regional government is required to run the government that is effective, efficient, and able to push the community's role in promoting equity and justice by developing the entire potential of each region. Autonomy success is inseparable from the ability in the field of finance. The purpose of this study was to determine the level of development of financial capability in Lumajang in order to support the implementation of regional autonomy. This study took place in Lumajang. While the data used in this study is the financial data in Lumajang budget 2010-2015 fiscal year. The data collection techniques is by documentation and undertaken in DPKD Lumajang

Descriptive Comparative Research Methods, using financial ratios, ie the ratio of local financial independence, the degree of decentralization tiskal, routine kemempuan index, the ratio of harmony and growth ratios. Based on the analysis that has been done the results are as follows: Based on the ratio of local financial independence shown by the ratio average is 7.88% remained between 0% - 25% are categorized as instructive relationship patterns which means the ability of the Government of Lumajang in meeting funding needed to perform the duties of Government, Development and Social Services community is still relatively low despite the years has increased and decreased in ratio degree of Fiscal Decentralization only has an average of 6.80%. this means that the level of independence / financial capability is still low Lumajang in implementing autonomy. IKR ratio based on average of only 9.75%, this means that the PAD has very less ability to finance its routine expenditure. At Harmony ratio, routine expenditures greater than the expense of development. While the ratio of growth, the overall increase in every year due to the increase in taxes and levies.

By looking at the results of the above analysis, financial development in Lumajang Financial sector is still lacking. Therefore, efforts to increase revenue either extending that local governments should be able to identify potential areas so that new opportunities for revenues to be sought, while the Touch ups are intensifying with the performance of the management of tax collection.

Keywords: Local government, regional autonomy, the Finance area.